



(BMD) tercatat sebanyak 1.356 persil aset tanah, semuanya telah dimanfaatkan dan dikuasai serta dikelola oleh OPD sesuai fungsinya masing-masing,” katanya.

Hal itu disampaikan dr. Ermon mewakili Bupati Tanah Datar saat menyambut Program Pegabdian Kepada Masyarakat (KPM) Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar Rabu, (5/10/2022).

Ermon menjelaskan, salah satu bentuk pengamanan aset di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan mensertifikkannya melalui Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).

Pengamanan aset juga merupakan salah satu penilaian dalam mengoptimalkan capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya sertifikasi aset tersebut telah dilakukan beberapa tahun belakangan setiap tahunnya, dan pada tahun ini Pemkab Tanah Datar menargetkan 80 persil untuk disertifikasikan

Ia mengaku, dalam upaya melakukan sertifikasi aset terdapat banyak kendala yang ditemui, diantaranya tidak ditemukannya lagi bukti atau dokumen lama, terutama aset tanah sekolah yang dahulunya telah dihibahkan untuk sarana pendidikan, atau fasilitas umum dan lainnya.

“Bahkan ada beberapa tanah yang digugat kembali oleh pihak ahli waris,” ujar Ermon.

Ermon juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unand yang telah memilih Kabupaten Tanah Datar untuk dijadikan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

“Terimakasih telah memilih Tanah Datar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang sebaik baiknya terhadap OPD di Tanah Datar dalam pengamanan dan penggunaan aset daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Prodi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Azmi Fendri SH. Mkn mengatakan kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu perwujudan tridama perguruan tinggi di lingkungan Universitas Andalas disamping pengajaran pendidikan dan penelitian.

“Ini adalah salah satu bentuk kegiatan bagaimana lingkungan perguruan tinggi bisa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaran dalam pengawasan aset tanah,” katanya.

Pada program tersebut membahas terkait dengan kepastian hukum atas tanah sebagai aset pemerintah daerah.

Turut hadir Kepala Baperlitbang Dr. Alfian Jamrah, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar Jimmy, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Januar Pembri, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Ten Feri, Camat Pariangan Yetriwel, Camat Padang Ganting Ronal Satria, Dinas Komunikasi dan Informatika Roza Melfita, dan undangan lainnya.(JH)